



**LAPORAN  
BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)  
DALAM RANGKA KEGIATAN BKSAP SDGs DAY  
KE PEKANBARU - RIAU**

Pekanbaru, Riau  
10 Februari 2022 s.d. 12 Februari 2022

---

## **I. PENDAHULUAN**

Selain memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran, DPR RI juga memiliki mandat untuk melaksanakan diplomasi parlemen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan politik luar negeri. Peran diplomasi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan politik luar negeri DPR RI dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan yang disebut Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), BKSAP diberikan mandat untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara

dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk partisipasi DPR dalam organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

Selanjutnya pada Pasal 116 Ayat 1 Huruf a dari UU tersebut juga menetapkan bahwa tugas BKSAP antara lain: "*Membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.*" Secara detail, tugas BKSAP disebutkan di dalam Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 82 dan 83 yang intinya BKSAP merupakan focal point yang mengkoordinasikan hubungan luar negeri atau diplomasi DPR terutama dengan parlemen-parlemen dunia.

Dalam menjalankan diplomasi parlemen, BKSAP DPR RI bergerak pada empat ranah yaitu bilateral, regional, internasional, serta perorangan. Secara bilateral, BKSAP DPR RI telah menjalin kerjasama dengan 102 negara melalui kehadiran Grup Kerjasama Bilateral (GKSB). Sedangkan pada level regional, BKSAP aktif pada forum-forum regional di tingkat Asia Tenggara, Asia, Asia Pasifik. Beberapa forum regional yang aktif diikuti oleh BKSAP antara lain Asian Parliamentary Assembly (APA), Asian Pacific Parliamentary Forum (APPF), ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA).

Sedangkan pada level internasional, BKSAP aktif menjalankan mandat diplomasi terutama pada event-event yang diadakan oleh lembaga parlemen dunia/Inter Parliamentary Union (IPU), dan perkumpulan parlemen anggota negara-negara Islam yaitu Parliamentary Union of OIC Members (PUIC). Kemudian, anggota DPR RI termasuk juga anggota BKSAP menjalankan diplomasi perorangan yang dilakukan sesuai dengan kepentingan-kepentingan nasional.

mengedepankan dialog, kerjasama, dan fokus pada isu-isu publik seperti pembangunan berkelanjutan, energi, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Tujuannya adalah tercapainya kepentingan nasional.

Salahsatu isu yang menjadi pokok diplomasi parlemen yang dijalankan BKSAP DPR RI berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Upaya BKSAP terkait implementasi SDGs dilakukan tidak hanya ke luar negeri tapi juga ke dalam negeri seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku ekonomi, Civil Society Organization (CSO) dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan peran DPR sebagai pen jembatan antara kepentingan nasional termasuk kepentingan nasional dan tuntutan global.

Oleh karena itu, BKSAP DPR RI mempunyai program kunjungan kerja ke daerah yang dikenal sebagai BKSAP SDGs Day. Fokus SDGs terutama pendidikan menjadi tema utama kunjungan BKSAP SDGs Day ke Pekanbaru - Riau. Tema BKSAP SDGs day ke Pekanbaru adalah **“PERAN STRATEGIS DIPLOMASI PARLEMEN DPR RI MELALUI PENDIDIKAN DAN PERTUKARAN BUDAYA”**. Dari sisi substansi, ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) ke-4; Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

#### **A. Dasar Pengiriman Delegasi**

Pelaksanaan BKSAP DAY pada tanggal 10 – 12 Februari 2022 di Pekanbaru, Riau didasarkan pada Keputusan Rapat Pimpinan BKSAP DPR RI tanggal 3 Januari 2022.

## B. Susunan Delegasi

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng (A-422)	Wakil Ketua BKSAP/(F-PKS) – Komisi II
2	Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc.MA. (A-449)	Anggota BKSAP (F-PKS) – Komisi I

## C. Maksud Kegiatan

Kunjungan Kerja BKSAP melalui BKSAP Day merupakan salah satu agenda rutin BKSAP DPR RI. Agenda ini dimaksudkan sebagai:

- Sarana memperkenalkan konsep dan implementasi diplomasi parlemen oleh BKSAP kepada khalayak publik.
- Sarana menjalin komunikasi dengan para pihak di tingkat daerah terutama dalam hal percepatan SDGs bidang pendidikan dan kebudayaan.
- Sarana menggali masukan dari pemangku kepentingan di daerah untuk memperkaya intervensi dan resolusi yang dibawa BKSAP di sidang-sidang internasional.
- Sarana menyerap informasi dan aspirasi publik sebagai bahan diplomasi bilateral.

## D. Tujuan Kegiatan

Kegiatan BKSAP SDGs Day bertujuan untuk menciptakan sinergitas yang lebih baik antara BKSAP dengan para pihak di daerah dalam rangka memperkuat diplomasi parlemen.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Agenda Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan BKSAP SDGs Day di Kota Pekanbaru-Riau dilaksanakan pada hari Jum'at, 11 Februari 2022 di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur Provinsi Riau dengan rincian agenda kegiatan sebagai berikut:

Waktu	Kegiatan	Ket.
14.00 - 14.05	Pembukaan Acara	MC
14.05 - 14.20	Sambutan Pembukaan oleh Wakil Gubernur Riau ( <b>H. Edy Afrizal Natar Nasution</b> )	
14.20 - 15.00	Paparan Wakil Ketua BKSAP DPR RI ( <b>Dr. Mardani Ali Sera</b> )	
15.00 - 16.00	Dialog dan Tanya Jawab	
16.00 - 16.15	Penutupan	
16.15 - 16.30	Foto Bersama	

### B. Jalannya Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan susunan acara. Kemudian dilanjutkan paparan oleh Wakil Gubernur Riau H. Edy Afrizal Natar Nasution.

#### 1. Pembukaan oleh Wakil Gubernur Riau, H. Edy Afrizal Natar Nasution

Diawali dengan pantun, Wakil Gubernur Riau pertama-tama menyampaikan ucapan terimakasih kepada BKSAP DPR RI yang telah menjadikan Riau sebagai tujuan kunjungan kerja BKSAP. Selain itu, Riau juga merupakan kawasan strategis yang berada di jalur pelayaran Selat Malaka. Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk sebanyak 6,39 juta. Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan

penduduk terbanyak yaitu 983,3 ribu jiwa disusul oleh Kabupaten Kampar (841,3 ribu), Indragiri Hilir (654,9 ribu), dan Rokan Hilir (637,1 ribu).



Menurutnya, Provinsi Riau yang memiliki keunggulan sumber daya alam yang sangat melimpah. Riau merupakan provinsi ke-6 dengan PDRB tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Kalimantan Timur dengan total PDRB sebesar 729,2 triliun pada tahun 2020. Artinya, Provinsi Riau merupakan salahsatu penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional baik itu dari pendapatan pajak maupun pendapatan hasil bumi secara langsung.

Dari sisi kontribusi sektoral, industri pengolahan berkontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu 28,27%, disusul sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 26,8%. Beberapa SDA yang menjadi andalan di Riau antara lain sektor migas, hutan, lahan, lahan gambut, lahan pertanian, perikanan, perkebunan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Riau memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Kehadiran BKSAP DPR RI tentu akan menjadi wadah bagi penyampaian aspirasi.

Kemudian Wakil Gubernur Riau juga menyampaikan bahwa semua keunggulan dan potensi daerah tersebut harus dikelola oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul agar mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Berbagai potensi daerah dapat dimaksimalkan apabila kualitas SDM tinggi dan berdaya saing serta berwawasan internasional. Oleh karena itu, sangat tepat jika kunjungan BKSAP ke Riau mengangkat tema pembangunan berkelanjutan terutama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pada bagian akhir sambutannya, Wakil Gubernur Riau berharap adanya kunjungan ini dapat menjadi wadah bagi seluruh yang hadir termasuk civitas akademika untuk menyampaikan aspirasinya. Di Provinsi Riau terdapat banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan pada skala internasional.



## **2. Paparan oleh Wakil Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera**

Dr. Mardani Ali Sera membuka paparannya dengan menyampaikan urgensi diplomasi antar parlemen. Pada awalnya, diplomasi dijalankan dengan model satu track yaitu melalui jalur pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu ternyata lebih dari 60% sistem pemerintahan di dunia menganut sistem parlementer. Oleh karena itu, diplomasi antar parlemen menjadi sangat penting.

Selama ini fungsi yang melekat dengan DPR RI terdiri dari tiga yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun ada dua fungsi lain yang belum banyak diketahui publik yaitu fungsi representasi dan fungsi diplomasi. Fungsi ini menegaskan konsep diplomasi total bahwa selain eksekutif, legislatif yaitu DPR juga mempunyai mandat untuk melaksanakan diplomasi secara bilateral, regional dan multilateral.

Pada saat yang sama, dunia saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan kontribusi banyak pihak tidak hanya pemerintah. Karena itu, proses berdiplomasi juga membutuhkan peran non-pemerintah terutama parlemen. Melalui parlemen, diplomasi dijalankan dengan pendekatan soft power melalui berbagai mekanisme seperti kolaborasi, dialog, serta knowledge sharing dalam berbagai bidang pembangunan mulai dari ekonomi, perdagangan, sosial, budaya dll.

Dari sisi landasan hukum, fungsi BKSAP ditetapkan melalui Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). BKSAP merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berperan sebagai penjuror (focal point) atau ujung tombak (spearhead) diplomasi parlemen (DPR).

BKSAP melaksanakan diplomasi parlemen secara bilateral, regional dan multilateral. Diplomasi secara bilateral dilakukan melalui pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) untuk meningkatkan hubungan bilateral antar negara. Pada periode ini, telah dibentuk GKSB dengan 102 negara sahabat sehingga DPR RI mempunyai jaringan kerjasama bilateral yang sangat luas termasuk di berbagai bidang.

Kemudian diplomasi pada tingkat regional dilakukan melalui keterlibatan DPR RI dalam organisasi dan forum-forum tingkat regional seperti di Majelis Parlemen ASEAN/ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), Forum Parlemen Asia Pasifik /Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), serta Majelis Parlemen Asia/ Asia Parliamentary Assembly (APA).

Sedangkan diplomasi secara multilateral dilakukan melalui partisipasi aktif dalam organisasi-organisasi antar parlemen tingkat global/ Inter Parliamentary Union (IPU), Perkumpulan Parlemen Negara-negara Islam/ Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)), serta organisasi perlemen global yang konsen terhadap isu korupsi yakni Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), G20 Speakers' Parliament dan lain sebagainya.



Selain itu, setiap anggota DPR RI termasuk anggota BKSAP juga mengemban misi diplomasi perorangan. Diplomasi perorangan ini tidak menjadi bagian dari kerja BKSAP secara khusus melainkan sebagai tanggung jawab setiap anggota DPR RI.

Selanjutnya, Dr. Mardani memaparkan beberapa area diplomasi parlemen yang tentu bisa ditindaklanjuti di daerah. Diplomasi oleh BKSAP mencakup berbagai isu global seperti perdagangan internasional,

perubahan iklim, krisis kemanusiaan, demokrasi dan HAM, digital disruption, dan tentunya pembangunan berkelanjutan. Dalam acara ini, BKSAP Day secara spesifik membawa misi percepatan pembangunan berkelanjutan.

Kemudian peran parlemen untuk memajukan pendidikan berkualitas antara lain: Pertama, parlemen tentu bisa memberikan dukungan melalui kebijakan dan regulasi. Kedua, DPR RI juga bisa memberikan dukungan alokasi anggaran dan pengawasan. Dalam hal ini tentunya pengawasan yang dilakukan BKSAP mencakup pengawasan di luar negeri. Ketiga, DPR RI juga berperan dalam monitoring pelaksanaan pendidikan melalui Komisi X yang membidangi pendidikan. Keempat, dalam membentuk pendidikan yang berkualitas, jejaring luar negeri melalui kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya juga sangat diperlukan.

BKSAP sebagai focal point diplomasi parlemen sangat bisa berkontribusi untuk peningkatan daya saing global. Setidaknya ada tiga langkah yang bisa dilakukan untuk mendukung pendidikan yang berdaya saing yaitu: Mempromosikan attractiveness yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan di Indonesia baik lembaga pendidikan tinggi maupun menengah, yaitu unsur-unsur yang menjadi daya tarik khas Indonesia di mata Internasional; Mendorong terciptanya peluang kerja sama dalam bidang Penelitian/ Riset/ Inovasi bagi berbagai persoalan Global; Mendorong pertukaran mahasiswa untuk meningkatkan wawasan global.

### 3. Sesi Dialog dan Tanya Jawab

Selanjutnya dilakukan sesi dialog dan tanya jawab dengan para civitas akademika yang ada. Sesi tanya jawab berlangsung sebagai berikut:



#### **Indrasjafri (Wakil Dekan Fisip, Universitas Islam Riau)**

- Perlu diperhatikan bahwa yang punya perkebunan sawit itu sebagian besar bukan warga lokal jadi perlu dianalisis siapa sebenarnya yang memiliki sawit?
- Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah penghasil sawit paling kaya tapi dari sisi infrastruktur paling buruk dan bahkan cenderung menjadi daerah termiskin di Provinsi Riau.

- Berkaitan dengan diplomasi antar parlemen, seharusnya BKSAP dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang menguntungkan. Apa yang sudah bapak-bapak delegasi BKSAP dapatkan?



**Zulwisman (Dosen Fakultas Hukum, Universitas Riau)**

- BKSAP perlu memberikan fokus yang lebih kuat pada sektor kesehatan dan pertahanan. Mengapa itu penting? karena dari sisi geografis, wilayah Riau sangat strategis sekaligus rentan.
- Riau sangat strategis karena berada di Selat Malaka, tapi apa keuntungannya?

**Rahman (Mahasiswa Universitas Riau)**

- Sebagai mahasiswa, program apa yang bisa ditawarkan BKSAP agar mahasiswa bisa ikut terlibat dalam program BKSAP?
- Ada program magang di DPR, tapi itu hanya 1 bulan jadi sangat kurang bagi pengembangan mahasiswa.
- Selama ini program magang dibuat sedemikian rupa tapi dari sisi sarana dan prasarana di perguruan tinggi tidak memadai.

### **Muhammad Rifqi (Mahasiswa Universitas Riau)**

- Pendidikan di masa pandemi menyebabkan berbagai kendala mulai dari pelaksanaan proses pengajaran dan hingga pembiayaan yang tetap tinggi.
- Bagaimana langkah pemerintah dan upaya-upaya DPR untuk meningkatkan pendidikan di era pandemi.

### **Amir Yusuf Nasution (Mahasiswa Universitas Islam Riau)**

- Adanya pandemi membuat perkuliahan terganggu. Karena itu, perlu kontribusi pemerintah dan juga DPR RI agar pandemi tidak memberatkan mahasiswa.
- Terkait dengan keunggulan Riau sebagai pusat perkebunan sawit terbesar di Indonesia, diperlukan suatu kerjasama yang lebih baik dengan negara-negara lain untuk mendatangkan ilmu dari luar negeri.

### **S. Parman (Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)**

- Sejauhmana variabel keunggulan strategis diplomasi parlemen yang dilakukan BKSAP DPR RI?
- Fasilitas apa yang bisa diberikan kepada mahasiswa? sebaiknya mahasiswa dilibatkan ketika melakukan diplomasi.

### **Faisal Talah (Mahasiswa UIN Suska Riau)**

- Terkait dengan kelapa sawit, saat ini perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan deforestasi dan juga perambahan hutan adat. Karena itu, deforestasi perlu diperhatikan.
- Selain itu, isu kesehatan mental di perguruan tinggi juga mendapatkan perhatian karena masalah ini sangat berbahaya bagi institusi

pendidikan. Usul konkretnya adalah mungkin perlu adanya pembentukan Satgas kesehatan mental di kampus-kampus.

#### **Suryadi (Mahasiswa UIN Suska)**

- Pandemi Covid-19 telah membuat beban mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan semakin tinggi terutama dari sisi biaya. Terkait hal ini perlu adanya langkah konkret dari BKSAP DPR RI untuk menyediakan bantuan pendidikan misalkan dalam bentuk beasiswa Covid-19.
- Hal lain berkaitan dengan pertukaran budaya, perlu adanya upaya-upaya strategis untuk mengembangkan dan melestarikan budaya lokal terutama budaya Melayu. Saat ini perhatian terhadap budaya Melayu terutama di kalangan generasi muda sangat rendah.

---

#### **4. Tanggapan Delegasi**

Selanjutnya para delegasi yaitu Dr. Mardani Ali Sera dan Dr. Jazuli Juwaini memberikan tanggapan terhadap beberapa pertanyaan yang muncul. Meskipun tidak menjawab rinci setiap pertanyaan, para delegasi berkomitmen untuk menyampaikan berbagai aspirasi tersebut di rapat-rapat komisi.

##### **Dr. Mardani Ali Sera**

- Dr. Mardani menegaskan kembali bahwa pembangunan daerah harus bertumpu pada sektor pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. BKSAP DPR RI akan terus menjadikan pendidikan sebagai arena diplomasi soft power untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan di Indonesia.

- Berbagai aspirasi dari kalangan citvitas akademika di Riau akan diteruskan ke para anggota DPR RI dari komisi yang sesuai dengan topik yang disampaikan.



#### **Dr. Jazuli Juwaini**

- Terkait pembagian keuangan pusat dan daerah saat ini belum mencerminkan keadilan. Ini juga berlaku bagi daerah-daerah penghasil seperti Riau. Sebagai anggota Komisi I, Dr. Jazuli telah membahas revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Pemerataan keuangan itu harus dilakukan tapi pemerataan juga harus didasarkan pada keadilan.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

- Melalui acara BKSAP SDGs Day, BKSAP DPR RI dapat mensosialisasikan fungsi dan mandat yang diembannya terkait diplomasi parlemen pada berbagai pihak terutama kalangan Perangkat

Daerah Provinsi Riau, civitas akademika, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Riau.



- Secara substantif, pelaksanaan BKSAP SDGs Day berhasil menjaring banyak aspirasi berbasis kedaerahan yang dapat dijadikan referensi diplomasi antar parlemen. Beberapa isu yang muncul antara lain perlunya pelibatan mahasiswa pada berbagai kegiatan diplomasi antar parlemen, diplomasi BKSAP agar menghasilkan dampak konkret bagi pembangunan daerah, adanya urgensi peningkatan kesadaran dan pemeliharaan budaya dan Adat Melayu, serta pentingnya pembangunan dan diplomasi yang fokus pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.



- Delegasi BKSAP DPR RI sangat mengapresiasi keterlibatan aktif para peserta BKSAP SDGs Day dan tentu akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan pada saat pertemuan.

## **B. Saran**

- Perlu adanya langkah konkret yang dilakukan oleh delegasi BKSAP untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi dari berbagai pihak terutama civitas akademika di daerah mengenai menyangkut pengembangan pendidikan di Riau.
- BKSAP tentunya bisa terus menjembatani kepentingan daerah dalam hal ini pendidikan dan kebudayaan di Riau dengan berbagai potensi di luar negeri melalui berbagai event kerjasama regional dan internasional.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Anggaran**

Biaya yang digunakan untuk melakukan perjalanan 2 (dua) orang Anggota DPR RI, 2 (dua) orang Pejabat dan 5 (lima) orang Staf Bagian Kerja Sama Bilateral Sekretariat Jenderal DPR RI, 2 (dua) orang wartawan pemberitaan

Parlemen dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli BKSAP adalah sebesar Rp. 104.814.000,- (Seratus empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)

B. Lampiran

- Liputan media cetak/media elektronik:

<https://dpr.go.id/berita/detail/id/37570/t/Perlu+Kerja+Sama+Seluruh+Pihak+untuk+Perkuat+Diplomasi+Parlemen>

[https://www.instagram.com/p/CZ26X9gv-zj/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CZ26X9gv-zj/?utm_medium=copy_link)

[https://www.instagram.com/p/CZ10IHuPJw5/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CZ10IHuPJw5/?utm_medium=copy_link)

- Makalah presentasi

C. Kata Penutup

Demikian Laporan Delegasi ini disusun dan disampaikan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Delegasi. Delegasi mengharapkan agar Laporan ini bermanfaat sebagai referensi dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Laporan ini juga dilengkapi dengan informasi tambahan sebagai lampiran berupa:

Jakarta, 21 Februari 2022

Ketua Delegasi



**Dr. Mardani Ali Sera**

### BKSAP SDGs DAY

#### PERAN STRATEGIS DIPLOMASI PARLEMEN DPR RI MELALUI PENDIDIKAN DAN PERTUKARAN BUDAYA




**DR. H. HARDANI ALI SERA, M.ENG**  
WAKIL KETUA BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) DPR RI

Kota Pekanbaru, Riau  
11 Februari 2022

### DELEGASI BKSAP DPR RI

Badan Kerjasama Antar Parlemen  
Deewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia



#### BKSAP SDGs DAY

PERAN STRATEGIS DIPLOMASI PARLEMEN DPR RI MELALUI  
DUNA PENDIDIKAN DAN PERTUKARAN BUDAYA



KOMISI I KOMISI II KOMISI X

### FUNGSI MODERN DPR RI

Paral 69 Ayat 1 dan 2 UU. 17/2014 tentang MDS:

DPR mempunyai fungsi: a. legislatif, b. anggaran dan c. pengawasan.

Ketiga fungsi legislatif, pengawasan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### LANDASAN HUKUM DIPLOMASI PARLEMEN

- UU 1945 Bab II Pasal 11: Peran DPR di buatkan oleh Presiden dalam membuat perjanjian dengan negara lain atau perjanjian internasional.
- UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional: Perjanjian Perjanjian Internasional ditetap dengan Undang-Undang.
- UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri: Penyelenggara hubungan luar negeri terdiri dari Pemerintah dan Non-Pemerintah (Pasal 5).
- UU No 17 Tahun 2014 tentang DPR, DPR, DPRD, DPD: Fungsi DPR dalam kerangka representasi rakyat (legislasi, anggaran, pengawasan) dan juga untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
- Tata Tertib DPR RI Tahun 2014 Pasal 219: DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah.

### DIPLOMASI PARLEMEN SEBAGAI BAGIAN DARI MULTI-TRACK DIPLOMACY



Diplomasi dimaknai sebagai kewenangan pemerintah, diplomasi parlemen dianggap sebagai *Track 2 diplomacy*.

Beberapa lain menyebutkannya sebagai *Track 1 1/2 Diplomacy* karena parlemen sebagai bagian dari institusi sebuah negara sekaligus yang mewakili aspirasi masyarakat (konstituen) dan melengkapi diplomasi pemerintah.

### SOFT POWER SEBAGAI PENDEKATAN DIPLOMASI BKSAP

**Hard Power**

Kekuatan dari suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui kebijakan yang bersifat memaksa terhadap negara atau aktor lainnya. Pada umumnya hard-power ditunjukkan melalui kekuatan militer.

**Soft Power**

Kekuatan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui persuasi atau daya tarik, baik dengan cara mengantarai, dijanjikan, atau sebaliknya. Masi dalam bidang Kerjasama pendidikan, pertukaran budaya di

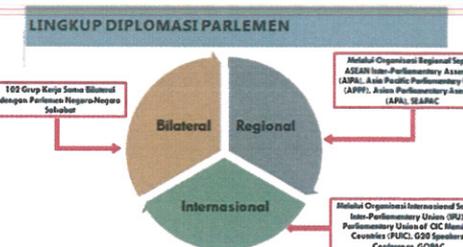
### ALAT KELENGKAPAN DPR RI



Salah satu alat kerja Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) yang merupakan lembaga parlemen formal parlemen atau yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang dimiliki DPR RI.

Memiliki, mengembangkan dan meningkatkan hubungan, persahabatan dan kerja sama antara DPR dan pemerintah negara baik, baik secara bilateral maupun multilateral.

### LINGKUP DIPLOMASI PARLEMEN



- 102 Grup Kerja Sama Bilateral dengan Parlemen Negara-Negara Sahabat
- Melalui Organisasi Regional Seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIP), Asia Pacific Parliamentary Forum (APPP), Asia Parliamentary Assembly (APA), SEAPAC
- Melalui Organisasi Internasional Seperti Inter-Parliamentary Union (IPI), Parliamentary Union of the OIC Member Countries (PUIC), G20 Speakers' Conference, GPRAC

### MAKSUD PELAKSANAAN BKSAP DAY

Maksud BKSAP Day:

1. Diseminasi fungsi, peran, dan tugas BKSAP DPR RI;
2. Menyerap aspirasi dan ide-ide inovatif dari pemerintah daerah dan berbagai pihak mengenai diplomasi parlemen;
3. Membangun sinergi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk penguatan diplomasi parlemen.

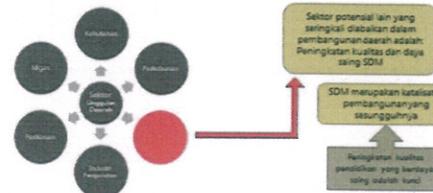
### AREA SASARAN DIPLOMASI PARLEMEN



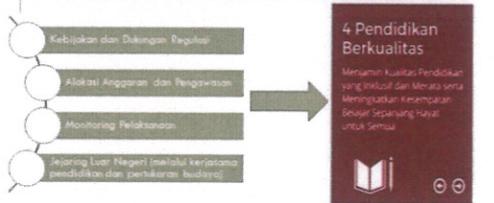
### DIPLOMASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



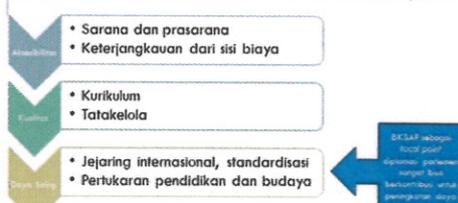
### MENGAPA PENDIDIKAN PENTING?



### PERAN STRATEGIS DIPLOMASI PARLEMEN DALAM Mendukung REALISASI (SDGS) BIDANG TERKAIT PENDIDIKAN



### BAGAIMANA PENDIDIKAN BERKUALITAS DIBENTUK?



### BAGAIMANA DIPLOMASI PARLEMEN Mendukung PENDIDIKAN BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING



TERIMAKASIH